

Judul : Senayan Patok Target Setoran BUMN Rp.45 Triliun: Rini Hanya Sanggup Tambah Kenaikan Dividen Rp500M

Tanggal : Jumat, 22 September 2017

Surat Kabar : Rakyat Merdeka

Halaman : 15

Senayan Patok Target Setoran BUMN Rp 45 Triliun

Rini Hanya Sanggup Tambah Kenaikan Dividen Rp 500 M

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun anggaran 2018 naik menjadi Rp 45 triliun. Kementerian BUMN merasa, kenaikan tersebut cukup berat.

JUMLAH setoran dividen naik Rp 1,3 triliun dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 43,7 triliun.

Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan, pemerintah sebelumnya sudah menaikkan target setoran dividen BUMN Tahun 2018 sebesar 11 persen atau menjadi Rp 43,7 dari target tahun ini sebesar Rp 41 triliun.

"Kenaikan target dividen menjadi Rp 45 triliun di 2018 cukup berat. Pasalnya, selain ada beberapa BUMN yang mengantongi laba yang cukup besar, masih ada juga BUMN yang rasio cadangan terhadap modal disetor masih minus, sehingga penarikan dividen tidak bisa dilakukan," kata Imam di Jakarta.

Imam mencontohkan, Perum Bulog Tahun 2017 sukses mengantongi laba hingga Rp 1 triliun tapi rasio cadangannya masih minus 8 persen.

Imam mengatakan, target dividen Rp 43,7 triliun di 2018 yang disepakati di RAPBN, akan didapat dari 26 BUMN yang sudah go public (Tbk) sebesar Rp 23,14 triliun, lalu dari 81 BUMN non Tbk sebesar Rp 19,5 triliun, lalu 18 BUMN di mana pemerintah menjadi pemegang saham minoritas Rp 112 miliar, dan 5 BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan

Rp 906 miliar.

"Kalaupun ada kenaikan, jumlahnya pun tidak lebih dari Rp 500 miliar. Memang berpeluang naik, tapi saya izin ke Bu Menteri BUMN (Rini Soemarno), beliau memberikan ancer-ancer tambahan kenaikan sekitar Rp 500 miliar," tuturnya.

Terlalu Kecil

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Djoko Udjianto mengatakan, kenaikan target dividen menjadi Rp 43,7 triliun di tahun depan itu dianggap masih terlalu kecil. Banggar DPR mengusulkan agar dinaikkan menjadi Rp 45 triliun.

"Ya sudah dibuleti saja jadi Rp 45 triliun. Pak Sesmen nakut-nakuti saja laba BUMN bisa turun atau naik di sisa tahun ini. Kalau turun saya yakin enggak kok, jadi Rp 45 triliun saja," ujarnya.

Akhirnya disepakati tambahan target Rp 1 triliun setelah Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suhasil Nazara, selaku ketua tim dari pihak pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN.

"Saya dan Pak Imam sepakat untuk naik Rp 1 triliun menjadi Rp 44,7 triliun. Kami akan merinci dahulu di masing-masing BUMN. Potensi kenaikan dividen nantinya bisa didapat dari BUMN yang sudah go public atau melantai di bursa," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua



SALAMAN: Pitt Dirut Perum Jamkrindo I Rusdonobanu (kanan) menerima penghargaan dari Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo sebagai juara ke-2 kategori BUMN Keuangan Non Listed pada acara Annual Report Award 2016 di Jakarta, Selasa (19/9).

Komisi VI DPR Azman Azman Natawijana menyebut, setoran dividen BUMN perlu diperhitungkan secara rasional seperti dengan memperhitungkan sejumlah aspek kinerja keuangan, kebutuhan cadangan modal, dan rencana investasi.

"Besaran dividen ini harus rasional, mengingat ada aturan yang sudah ditetapkan Undang-undang mengenai besaran dividen. Jadi setoran dividen itu tidak setiap ta-

hun harus dinaikkan karena juga harus melihat kondisi masing-masing BUMN," ujarnya.

Pengamat BUMN Ferdinand Hutahaean mengatakan, kenaikan target dividen dari usulan pemerintah sebenarnya masih memungkinkan.

"Kalau dilihat per sektor, masih ada BUMN yang bisa menyumbang dividen lebih besar. Khususnya yang menangani proyek infrastruktur dan BUMN

strategis yang dapat penugasan pemerintah sehingga mengantongi laba lebih besar," ujar Ferdinand kepada *Rakyat Merdeka*.

Selain itu, dalam tahun berjalan, Kementerian BUMN harus menggenjot kinerja BUMN yang masih merugi atau keuangannya masih kecil, sehingga bisa menghasilkan laba lebih besar. "Dengan langkah ini, dividen untuk negara bisa dinaikkan di Tahun 2018," tegasnya. ■ NOV